

EVALUASI SISTEM BELAJAR DI RUMAH

Hanya 55% Sekolah yang Murni Online

YOGYA (KR) - Sistem pembelajaran jarak jauh di DIY sudah berlangsung sejak 23 Maret 2020 sampai hari ini. Evaluasi dilakukan setiap dua pekan sekali untuk diputuskan ada perpanjang-an atau tidak. Sampai saat ini sudah ada lima SE Gubernur dan tujuh dari dinas di kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil evaluasi, dalam proses pembelajaran jarak jauh awalnya diharapkan semuanya menggunakan aplikasi Jogja Belajar atau *JB Class*. Namun, di tengah-tengah sempat terjadi *down*. Guna tetap menunjang belajar di rumah, beberapa sekolah ada yang menggunakan *google classroom* dan aplikasi belajar yang lain.

Hasilnya, dari semua jenjang pendidikan di DIY, 55-57 persen SMA/K menggunakan online murni.

Dengan artian ada proses interaksi antara guru dengan siswa. Selanjutnya 40 persen semi interaktif atau menggunakan *WhatsApp* (WA). "Dalam hal ini banyak keluhan. Karena modelnya lebih ke penguasaan saja. Dan itu menjadi keluhan dari sebagian besar orangtua," ujar Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Mutu Pendidikan Disdikpora DIY Didik Wardaya, Minggu (10/5).

Sebagian besar orangtua mengeluh, karena mereka

sudah disibukkan dengan pekerjaan, masih harus mendapati tugas sekolah anaknya yang dirasa berat. Ada juga guru atau sekolah yang dalam sistem belajar jarak jauh ini murni penguasaan saja. Meskipun angkanya kurang dari 5 persen. Itu didominasi karena pendidik yang kurang familiar dengan teknologi.

Didik menambahkan, secara normatif kegiatan belajar mengajar (KBM) akan berakhir tanggal 15 Mei 2020 untuk yang mem-

berlakukan 5 hari sekolah. Sedangkan yang enam hari sekolah, pada 16 Mei 2020. Selanjutnya libur puasa mulai tanggal 17 Mei akhir Ramadan dan masuk lagi tanggal 1 Juni 2020. Diharapkan pada tanggal itu Covid-19 sudah benar-benar selesai, sehingga untuk siswa SMA/K bisa mengikuti Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau ujian kenaikan kelas pada 4 Juni 2020.

"Jika ini belum selesai atau anak masih harus di rumah, tentu akan ada evaluasi lagi. Terutama yang berkaitan dengan penambahan pulsa internet. Dan jika hanya dua bulan, BOS masih bisa untuk meng-covernya. Karena,

rata-rata kebutuhan tiap anak untuk sistem belajar daring ini adalah 10 GB atau Rp 100 ribu bisa tercukupi untuk 30 hari dengan model WA biasa," ungkapnya.

Anggaran BOS untuk pulsa yang sudah disiapkan Disdikpora DIY dan sekolah adalah untuk dua bulan. Jika sampai Juni Covid-19 belum selesai dan PAT terpaksa dilakukan di rumah, masih memungkinkan. "Itu hal yang kita pikirkan, jika skenario berikutnya. Misalnya sampai September atau ada tambahan 2,5 bulan anak harus di rumah. Banyak skenario pembelajaran yang harus diubah," kata Didik. (Awh/Bro)-o

JIKA KONDISI SUDAH KONDUSIF Dikaji Masuk Sekolah Minggu Ketiga Juli

JAKARTA (KR) - Skenario Belajar dari Rumah (BDR) akan terus berlangsung sampai Pemerintah mencabut keadaan darurat Covid-19.

"Skenario pertama, jika Covid-19 berakhir akhir Juni dan situasi sudah kondusif, maka siswa masuk sekolah tahun pelajaran baru minggu ke-3 Juli 2020," ujar Pj Dirjen PAUD-Pendidikan Tinggi Pendidikan Menengah Kemendikbud Hamid Muhammad kepada KR, Minggu (10/5).

Kemudian, skenario kedua jika Covid-19 berlangsung sampai September, siswa BDR sampai September, selebihnya masuk sekolah. Selanjutnya, jika Covid-19 sampai akhir tahun, maka se-

mua siswa BDR selama satu semester penuh. "Artinya awal 2021 baru masuk ke sekolah" ungkapnya.

Dikatakan, semua sedang dikaji. Pembukaan sekolah pertengahan Juli di daerah yang sudah dinyatakan aman dari Covid-19.

Hamid mengatakan Gugus Tugas Covid Pusat dan Daerah setempat akan menetapkan data terkait penentuan wilayah yang dinyatakan aman dari Covid-19. Sementara itu, bagi wilayah yang masih dinyatakan belum aman akan tetap melakukan kegiatan belajar dari rumah (BDR). "Siswa tetap BDR sampai daerahnya dinyatakan aman," ujar Hamid. (Ati)-o

KESEJAHTERAAN GURU HONORER MASIH MEMPRIHATINKAN Butuh Perhatian dan Solusi Pemerintah

YOGYA (KR) - Kesejahteraan guru yang di dalamnya termasuk guru honorer harus menjadi fokus perhatian pemerintah. Salah satu cara untuk mewujudkan hal itu adalah pemerintah menjamin terpenuhinya pendapatan guru yang layak, seperti yang diusulkan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI).

Hal itu penting, karena dalam masa pandemi Covid-19, jutaan guru honorer menghadapi situasi sulit dan pendapatan yang tidak jelas. Sebab selama masa darurat Covid-19 para guru tidak lagi hadir di ruang kelas. Padahal selama ini mereka digaji per jam sesuai dengan jam mengajar.

"Sebetulnya perjuangan untuk memperbaiki kesejahteraan guru sudah dilakukan sejak lama. Munculnya organisasi profesi seperti PGRI salah satu tujuannya

mengangkat harkat martabat guru agar kesejahteraannya diperbaiki. Namun pemerintah tidak hanya memperbaiki pendidikan saja semua lini, sehingga bertahap," kata pengamat pendidikan sekaligus mantan ketua PGRI DIY, Ahmad Zainal Fanani SPd MA di Yogyakarta, Minggu (10/5).

Zainal mengungkapkan, kalau melihat penghasilan guru secara umum masih memprihatinkan. Meski untuk guru PNS sudah membaik dengan tunjangan sertifikasi. Begitu pula dengan guru yayasannya yang terbantu dengan sertifikasi khususnya untuk bagian yang sudah sertifikasi. Namun bagi guru honorer dan guru yayasan yang belum sertifikasi masih memprihatinkan. Karena bagi sekolah swasta, hidup dan matinya tergantung

jumlah siswa serta kondisi kemampuan orangtua untuk membiayai sekolah anaknya.

"Kalau dilihat secara nasional guru swasta honorer termasuk guru honorer di sekolah negeri masih memprihatinkan dan jumlahnya cukup banyak. Hal itu terjadi karena banyak guru PNS pensiun, sementara penggantian guru honorer, mengingat pengangkatan PNS yang terbatas," terang Zainal.

Ditambahkan, adanya pandemi Covid-19 sedikit banyak menjadikan guru non PNS jadi bertambah. Karena akibat berbagai kendala atau persoalan yang ada mereka jadi terlambat menerima gaji. Kondisi tersebut terjadi di sejumlah daerah di Indonesia termasuk DIY. Bahkan gaji guru honorer tersebut secara umum masih di bawah UMR. (Ria)-o

Padukan Dana Desa-BOS untuk Pendidikan



KR-Gunarwan

Pelajar memanfaatkan internet fasilitas desa untuk belajar secara mandiri.

PURWOREJO (KR) - Penggunaan jaringan internet untuk kegiatan dan pelayanan pendidikan kini mutlak menjadi kebutuhan. Menyusul adanya pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan untuk menggelar pertemuan orang banyak, termasuk sekolah.

"Ini kalau tidak disikapi de-

ngan bijak, proses pendidikan akan mandeg," kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Purworejo Sukmo Widi Harwanto SH MH, Sabtu (9/5).

Menurutnya, beberapa desa di wilayah Purworejo telah berupaya memfasilitasi para siswa yang merupakan war-

ganya untuk mengakses pendidikan melalui internet. "Pihak desa memberikan fasilitas internet, namun dalam setiap pertemuan tetap mematuhi prosedur sehingga tidak terjadi perkumpulan banyak orang," tambahnya.

Diakui, untuk memberikan akses internet bagi para siswa pihak desa harus mengeluarkan biaya besar. Paling tidak Rp 750 ribu perbulan, untuk biaya berlangganan. Itu saja bagi desa yang dekat dengan jaringan fasilitas seluler sehingga mudah mengakses internet.

Sukmo Widi mengakui bahwa untuk memberikan fasilitas belajar dengan jaringan internet biayanya besar. "Kita akan bantu bersama sekolah di desa setempat. Bisa menggunakan dana BOS," tambahnya. (Nar)-o

EKONOMI



KR-Istimewa

Bantuan dari dunia usaha siap didistribusikan.

Dunia Usaha Bantu Tangani Covid-19

YOGYA (KR) - Mantan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyerukan semua pihak bahu-membahu saling membantu dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Pengusaha dan yang berkecukupan untuk membantu rumah-rumah sakit, dan daerah yang warganya memerlukan Alat Pelindungan Diri (APD).

"Bangsa ini memerlukan semua elemennya untuk *urun rembug* saling membantu. Karena tidak ada satu negara pun yang siap. Sekaliber Amerika sekalipun, tidak siap" kata Enggartiasto bersama Alek Sumadi Seng dan Then Herry Yulianto dari Yayasan Sahati di sela penyerahan bantuan di Jakarta, Kamis (7/5). Bantuan diserahkan oleh Yunita Wulandari mewakili management EL Hotel Royale Yogyakarta Maliboro kepada Letkol Agung Riyadi dari pihak RSPAU dr S Hardjolutiko Yogyakarta.

Yunita Wulandari mengatakan, bahwa sumbangan alat kesehatan ini dikumpulkan dari para pengusaha yang peduli dan ingin berkontribusi mengatasi pandemi Covid-19. andung, Malang, Surabaya, Solo, Yogyakarta, dan Cirebon. (Has)-o

Laba CIMB Niaga Naik 11,8 Persen

JAKARTA (KR) - Laba PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) pada kuartal pertama tahun 2020 sebesar Rp 1,1 triliun naik sebesar 11,8 persen yoy (year on year) dan menghasilkan earnings per share Rp 42,33. Pertumbuhan laba bersih ini terutama didukung oleh pendapatan nonbunga atau noninterest income sebesar 11,5 persen yoy dan penurunan pada biaya operasional sebesar 2,7persen yoy. Hasilnya, rasio cost to income turun menjadi di bawah 48 persen.

"Di tengah kondisi yang menantang akibat pandemi Covid-19, kami berhasil meraih pertumbuhan laba bersih dua digit untuk kuartal pertama 2020. Sementara, rasio loan loss coverage meningkat menjadi 191,13 persen, dan biaya provisi naik menjadi 8,7 persen yoy," kata Presiden Direktur CIMB Niaga Tigor M Siahanu di Jakarta, Jumat (8/5).

Adapun Capital Adequacy Ratio (CAR) CIMB Niaga tercatat naik 19,39 persen per 31 Maret 2020. Dengan total aset mencapai Rp 274,5 triliun per 31 Maret 2020, CIMB Niaga mempertahankan posisinya sebagai bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia dari sisi aset. Total penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp 202,6 triliun dengan rasio CASA sebesar 60,1 persen. (Lmg)-o

PERMINTAAN HOREKA BERKURANG DRASTIS

Harga Bapok di DIY Terpantau Stabil

YOGYA (KR) - Harga bahan pangan pokok (bapok) secara keseluruhan normal dan stabil di beberapa pasar tradisional Yogyakarta memasuki pekan kedua April 2020. Kestabilan harga tersebut berkat ketersediaan pasokan yang mencukupi, bahkan sedikit kelebihan kapasitas produksi. Sedangkan permintaan masyarakat meskipun masih tinggi tetapi berkurang terutama dari hotel, restoran dan catering atau horeka.

"Harga bapok secara keseluruhan masih tergolong normal dan stabil di DIY saat ini. Bahkan ketersediaan pasokan untuk DIY cukup karena serapan pasar sangat berkurang terutama permintaan horeka selama masa wabah Covid-19 ini. Horeka banyak yang tutup sehingga mengurangi serapan permintaan bapok di DIY, namun permintaan masyarakat

cukup tinggi," tutur Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag DIY Yanto Apriyanto di Yogyakarta, Minggu (10/5).

Secara umum, pasokan bapok di DIY sangat mencukupi paling tidak untuk tiga hingga enam bulan ke depan semisal beras, daging ayam, telur ayam, cabai, bawang merah dan sebagainya. Termasuk stok gula pasir di DIY masih mencukupi bagi ke-

butuhan masyarakat DIY meskipun harganya masih tergolong tinggi. Masih mahalnya harga gula pasir di DIY ini hanya menghabiskan stok lama karena memang dibeli dari distributor dengan harga tinggi sebelumnya. Untuk itu, pihaknya bekerjasama dengan instansi dan produsen gula pasir di DIY mengencarkan operasi pasar gula pasir dan komoditas lainnya saat ini.

"Permintaan masyarakat masih cukup tinggi di DIY, hanya untuk kebutuhan horeka yang menurun drastis sehingga beberapa komoditas serapan pasarnya sangat berkurang. Di sisi lain, petani tengah kelebihan produksi karena memang memasuki musim panen raya seperti beras, cabai, bawang merah, daging ayam dan sebagainya. Sehingga masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir perihal stok bapok di DIY selama bulan puasa dan masa tanggap darurat Covid-19 di DIY.

"Kami tetap ingatkan masyarakat agar berbelanja sesuai dengan kebutuhan sehingga jangan

berbelanja berlebihan atau sampai menimbun barang. Kami pastikan pula distribusi bapok di DIY juga lancar selama masa wabah virus Korona," tandas Yanto.

Dari hasil pemantauan perkembangan harga bapok di beberapa pasar tradisional di Kota Yogyakarta stabil dialih-alih ke beberapa pasar medium Rp 9.700/kg, beras premium Rp 10.800/kg, gula pasir Rp 16.000/kg, minyak goreng Rp 11.700/liter dan tepung terigu Rp 8.700/kg. Selanjutnya daging sapi Rp 120.000/kg, daging ayam broiler Rp 29.000/kg, daging ayam kampung Rp 75.000/kg dan telur ayam ras Rp 19.500/kg. (Ira)-o

Daya Beli Petani di Pedesaan DIY Tertekan

YOGYA (KR) - Nilai Tukar Petani (NTP) atau daya beli petani pedesaan di DIY pada April 2020 mencapai angka 100,69 mengalami penurunan 1,19 persen dibanding indeks bulan sebelumnya yang tercatat 101,91. Penurunan NTP DIY selama April 2020 ini disebabkan penurunan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,46 persen lebih rendah dibanding indeks harga barang dan jasa yang dibayar petani yang turun sebesar 0,27 persen.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) DIY Heru Margono mengatakan, NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat kemampuan daya beli petani di pedesaan serta menunjukkan daya tukar (term of trade) antara produk pertanian yang dijual petani dengan barang dan jasa yang dibutuhkan petani dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan hasil pemantauan harga di wilayah DIY pada April 2020, NTP mengalami penurunan indeks 1,19 persen dibanding NTP Maret yaitu dari 101,91 menjadi 100,69.

"Penurunan indeks NTP yang tercatat pada April 2020 terjadi pada empat subsektor subsektor. Empat subsektor tersebut yaitu subsektor tanaman pangan

sebesar 0,77 persen, subsektor hortikultura 1,17 persen, subsektor peternakan 3,13 persen dan subsektor perikanan 0,20 persen. Sedangkan subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan 0,69 persen," ujar Heru di Yogyakarta, Minggu (10/5).

Heru menyampaikan NTP Subsektor Tanaman Pangan tercatat 102,16, NTP Subsektor Hortikultura 106,82, NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat 119,06, NTP Subsektor Peternakan 90,18 dan NTP Subsektor Perikanan 94,55. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) DIY April 2020 sebesar 101,13 atau turun sebesar 1,48 persen dibanding Maret sebesar 102,65.

"Tiga subsektor NTUP mengalami penurunan, yaitu tanaman pangan sebesar 1,16 persen, hortikultura 1,43 persen, peternakan juga turun 3,12 persen dan perikanan 0,40 persen. Sedangkan subsektor tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan 0,12 persen," ujarnya.

Untuk Indeks Harga Konsumen (IHK) pedesaan di DIY pada April 2020 secara umum mencapai 106,76 atau mengalami deflasi 0,33 persen dibanding IHK pada bulan sebelumnya yang tercatat 107,11. (Ira)-o

Disesalkan, Peluncuran AMDK Sekali Pakai

JAKARTA (KR) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Greenpeace Indonesia sangat menyayangkan keluarnya produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berbentuk galon sekali pakai. Produksi AMDK galon sekali pakai ini dianggap akan semakin menambah masalah lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik sekali pakai (single use) di masyarakat. Apalagi jika perusahaan yang memproduksi kemasan itu tidak menunjukkan tanggung jawab untuk menarik kembali galon kemasan tersebut dari konsumen.

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulastri mengatakan, secara bisnis atau marketing, perusahaan memang ingin melakukan sebuah inovasi baru dengan menciptakan kemasan baru. Tapi dari sisi lingkungan, YLKI secara tegas tidak mendukungnya.

"Kita justru minta perusahaan mengurangi sampah plastik untuk bahan pangan khususnya air minum kemasan sekali pakai karena itu akan sangat membebani bumi. Plastik tidak bisa terurai. Kok ini malah memproduksi bahan plastik sekali pakai yang baru. Kita tidak mendukung produk kemasan semacam itu," tegas Sulastri di Jakarta, Sabtu (9/5).

Senada dengan Sulastri, Juru Kampanye Urban Greenpeace Indonesia Muharram Atha Rasyadi mengaskan, produk AMDK galon sekali pakai itu jelas akan menjadi masalah baru mengingat dampak pada lingkungan yang selama ini ditimbulkan dan juga tidak sejalan dengan target pemerintah mengurangi sampah di laut sebesar 70% di tahun 2025. (Fon)-o